



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116/PMK.010/2017

TENTANG

BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai jenis barang kebutuhan pokok yang atas impor dan/atau penyerahannya tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 tentang Barang-Barang Kebutuhan Pokok yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001 tentang Penyerahan Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016, perlu mengganti ketentuan mengenai jenis barang kebutuhan pokok yang atas impor dan/atau penyerahannya tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

- (1) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang antara lain barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

- (2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, yang berupa:
- a. beras dan gabah;
 - b. jagung;
 - c. sagu;
 - d. kedelai;
 - e. garam konsumsi;
 - f. daging;
 - g. telur;
 - h. susu;
 - i. buah-buahan;
 - j. sayur-sayuran;
 - k. ubi-ubian;
 - l. bumbu-bumbuan; dan
 - m. gula konsumsi
- (3) Kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat usulan dari kementerian pembina sektor terkait.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 tentang Barang-Barang Kebutuhan Pokok yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001 tentang Penyerahan Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1136

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 116/PMK.010/2017
 TENTANG
 BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI
 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK
 DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

NO	URAIAN BARANG	KRITERIA	POS TARIF	KETERANGAN
a.	Beras dan Gabah	berkulit, dikuliti, setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, pecah, menir, selain yang cocok untuk disemai	1006.10.90 1006.20.10 1006.20.90 1006.30.30 1006.30.40 1006.30.91 1006.30.99 1006.40.90 Ex 1103.19.20	Hanya menir
b.	Jagung	telah dikupas maupun belum, termasuk pipilan, pecah, menir, tidak termasuk bibit	1005.90.10 1005.90.90 Ex 1103.13.00	Hanya Menir
c.	Sagu	empulur sagu (sari sagu), tepung, tepung kasar dan bubuk	0714.90.11 0714.90.19 1106.20.20	
d.	Kedelai	berkulit, utuh dan pecah, selain benih	1201.90.00	
e.	Garam konsumsi	beryodium maupun tidak (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) untuk konsumsi/ kebutuhan pokok masyarakat)	2501.00.10 2501.00.91	
f.	Daging	daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, baik yang didinginkan, dibekukan, digarami, dikapur, diasamkan, atau diawetkan dengan cara lain.	0201.10.00 0201.20.00 0201.30.00 0202.10.00 0202.20.00 0202.30.00 0203.11.00 0203.12.00 0203.19.00 0203.21.00 0203.22.00 0203.29.00 0204.10.00 0204.21.00	

h.	Susu	susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan (pasteurisasi), tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya.	Ex 0401.10.10 Ex 0401.10.90 Ex 0401.20.10 Ex 0401.20.90 Ex 0401.40.10 Ex 0401.40.20 Ex 0401.40.90 Ex 0401.50.10 Ex 0401.50.90	Selain kepala susu dan susu yang mengandung tambahan gula atau bahan lainnya
i.	Buah-buahan	buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading, selain yang dikeringkan		
j.	Sayur-sayuran	sayuran segar, yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah atau dibekukan, termasuk sayuran segar yang dicacah.	0701.90.10 0702.00.00 0704.10.10 0704.10.20 0704.20.00 0704.90.10 0704.90.20 0704.90.90 0705.11.00 0705.19.00 0705.21.00 0705.29.00 0706.10.10 0706.10.20 0706.90.00 0707.00.00 0708.10.00 0708.20.10 0708.20.20 0708.20.90 0708.90.00 0709.20.00 0709.30.00 0709.40.00 0709.51.00 0709.59.10 0709.59.90 0709.60.90 0709.70.00 0709.91.00 0709.92.00	

			0709.93.00 0709.99.10 0709.99.20 0709.99.90 Ex 0710.10.00 Ex 0710.21.00 Ex 0710.22.00 Ex 0710.29.00 Ex 0710.30.00 Ex 0710.40.00 Ex 0710.80.00 Ex 0710.90.00	Selain yang dimasak Selain yang dimasak Selain yang dimasak Selain yang dimasak Selain yang dimasak Selain yang dimasak Selain yang dimasak Selain yang dimasak Selain yang dimasak
k.	Ubi-ubian	ubi segar, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading.	Ex 0714.10.19 0714.10.91 Ex 0714.10.99 0714.20.10 Ex 0714.20.90 0714.30.10 Ex 0714.30.90 0714.40.10 Ex 0714.40.90 0714.50.10 Ex 0714.50.90	Selain dalam bentuk pellet dan selain yang dikeringkan Selain yang dikeringkan Selain yang dikeringkan Selain yang dikeringkan Selain yang dikeringkan Selain yang dikeringkan
l.	Bumbu-bumbuan	segar, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan atau ditumbuk	0703.10.19 0703.10.29 0703.20.90 0703.90.90 0709.60.10 0904.21.10	

m.	Gula konsumsi	gula kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna	Ex 1701.99.90	Hanya gula dari tebu
----	---------------	--	---------------	----------------------

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

